

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING DI DESA PADASARI KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG

Disusun oleh:

NAMA : AYU PATMAWATI
NOMOR POKOK : 1635222745
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Menyelesaikan
Program Sarjana (S1)
(STIA) Sebelas April Sumedang*



SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

SEBELAS APRIL SUMEDANG

2020

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING DI DESA PADASARI KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG

NAMA : AYU PATMAWATI
NOMOR POKOK : 1635222745
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

171 halaman, 5 Bab, 61 Tabel, 4 Gambar, 9 Lampiran
Daftar Pustaka : 26 Buku, 3 Dokumen

Stunting adalah sebuah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang tinggi badannya jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan anak seusianya akibat kekurangan gizi. Pencegahan stunting termasuk ke dalam salah satu yang difokuskan dalam pembangunan kesehatan dikarenakan pertumbuhan di usia dini adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Karena salah satu penyebab dari stunting yaitu bisa timbul dari faktor lingkungan, juga dari makanan yang dikonsumsi, baik dilihat dari sumber gizinya atau vitaminnya. Keberhasilan Program Pencegahan Stunting dapat dilihat apabila Efektivitas Program berjalan mengacu pada ukuran-ukuran efektivitas program.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Efektivitas Program Pencegahan Stunting di Desa Padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten sumedang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi : observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan triangulasi. Penentuan sampel/informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan purposive sampling yaitu sebanyak 6 orang. Sedangkan prosedur pengolahan data digunakan analisis data model Milles dan Huberman.

Hasil akhir penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program Pencegahan Stunting di Desa Padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang sudah dilaksanakan sesuai dengan ukuran-ukuran efektivitas program secara efektif, akan tetapi masih belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa hal yaitu dalam kurangnya SDM yang memahami program yang dijalankan, anggaran yang masih kurang dan belum optimal, kurang jelasnya dalam penyampaian informasi, dan pengawasan yang masih kurang optimal dalam program pencegahan stunting. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi dan rekomendasi untuk mendukung kelancaran pengurangan angka stunting pada program pencegahan stunting di Desa Padasari.

Kata Kunci: Efektivitas Program

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF STUNTING PREVENTION PROGRAMS IN PADASARI VILLAGE, CIMALAKA DISTRICT, SUMEDANG DISTRICT

NAME : AYU PATMAWATI
MAIN NUMBER : 1635222745
STUDY PROGRAM : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

171 pages, 5 Chapters, 61 Tables, 4 Pictures, 9 Attachments
References: 26 Books, 3 Documents

Stunting is a condition of failure to thrive in children under five whose height is much shorter than the height of a child of his age due to malnutrition. Prevention of stunting is included in the one that is focused on health development because growth at an early age is important to note. Because one of the causes of stunting is that it can arise from environmental factors, also from the food consumed, both viewed from the nutritional source or its nutrition. The success of the Stunting Prevention Program can be seen if the effectiveness of the running program refers to measures of program effectiveness.

This study aims to find out how the effectiveness of the Stunting Prevention Program in Padasari Village, Cimalaka District, sumedang Regency. This research was conducted using qualitative methods. Data collection techniques are carried out through literature studies and field studies which include: observation, interviews, documentation studies, and triangulation. Determination of the sample / informant in this study was carried out using purposive sampling as many as 6 people. While the data processing procedures used in the data analysis are Milles and Huberman models.

The final results of this study conclude that the implementation of the Stunting Prevention Program in Padasari Village, Cimalaka District, Sumedang Regency has been carried out in accordance with effective program effectiveness measures, but is still not optimal. This can be seen from several things, namely in the lack of human resources who understand the programs being run, the budget that is still lacking and not optimal, the lack of clarity in the delivery of information, and supervision that is still less than optimal in stunting prevention programs. Therefore, the results of this study can be used as references and recommendations to support the smooth stunting reduction in the stunting prevention program in Padasari Village.

Keywords: Program Effectiveness

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan Skripsi penelitian ini sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Tak lupa sholawat berangkaian salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mempunyai suri tauladan dan membawa umat manusia keluar dari Zaman kebodohan menuju zaman yang terang menderang dengan ilmu pengetahuan.

Syukur alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Skripsi Penelitian ini dengan judul ; ***“Efektivitas Program Pencegahan Stunting di Desa Padasari Kecamatan Cimilaka Kabupaten Sumedang”***, diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Administrasi Sebelas April Sumedang.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini. Ucapan terimakasih ditunjukkan terutama kepada :

1. Yth. Bapak Drs., H. Yuyun Hidayat, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Sebelas April Sumedang.
2. Yth. Ibu Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si., selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.

3. Yth. Bapak Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si selaku pembantu ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi sekaligus pembimbing 2 yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun proposal penelitian ini.
4. Yth. Bapak Shofwan Hendryawan, S.Pd.,M.Pd., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
5. Yth. Ibu Irma Hermayanti, S.Pd., M.Si selaku pembantu ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
6. Dr. Arif Rahman Sudrajat., M.Si selaku pembimbing 1 yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun proposal penelitian ini.
7. Yth. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang yang telah membekali ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Yth. Kepala Desa Padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.
9. Yth. Seluruh Pegawai dan staff Desa Padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.
10. Kerabat dan keluarga saya, Ibu dan Bapak tercinta yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian studi ini.
11. Rekan – rekan mahasiswa serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Semoga segala bimbingan, bantuan, nasehat dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamin.

Wassalamualaikum wr. Wb

Sumedang, Juli 2020
Peneliti

AYU PATMAWATI



DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERBAIKAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	...i
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL..... viii
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hakekat Adminitrasi	9
1. Pengertian Administrasi	9
2. Administrasi Negara	10
3. Ciri-ciri Administrasi Negara	11
4. Administrasi Negara Di Pandang Sebagai Suatu Sistem	14
B. Hakekat Kebijakan	14
1. Pengertian Kebijakan	14
2. Pengertian Kebijakan Publik	15
3. Analisis Kebijakan Publik	16
4. Perumusan Kebijakan Publik	17
C. Implementasi Kebijakan	18

1. Pengertian Implementasi Kebijakan	18
2. Tahapan- Tahapan Implementasi Kebijakan.....	19
3. Faktor yang Berpengaruh dalam Implementasi Kebijakan.....	20
4. Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik	22
a. Pengertian Evaluasi Kebijakann	22
b. Kriteria Evaluasi Kebijakan	23
5. Hambatan-Hambatan dalam Implementasi Kebijakan.....	23
6. Upaya-Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan	26
D. Efektivitas Program	28
1. Pengertian Efektivitas	28
2. Ukuran-ukuran Efektivitas	29
3. Pengertian Efektivitas program.....	30
4. Ukuran Efektivitas Program.....	31
E. Kaitan Administrasi Negara Dengan Efektivitas Program	33
F. Tinjauan Program Pencegahan Stunting Desa	35
1. Dasar Pemikiran Stunting	35
2. Program Pencegahan Stunting	35
3. Pelindung Program Pencegahan Stunting	36
4. Tujuan Pencegahan Stunting.....	37
5. Sasaran Dalam Pelaksanaan Program Pencegahan Stunting	37
G. Kajian Terdahulu.....	38
H. Kerangka Pemikiran dan Pertanyaan	39
1. Kerangka Pemikiran.....	39
2. pertanyaan penelitian	44

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian	46
B. Penentuan Sasaran dan Informa Penelitian	49
1. Penentuan Sasaran	49
2. Informan Penelitian	50
C. Teknik Pengumpulan Data	51
D. Prosedur Pengolahan Data	52

E. Lokasi dan Jadwal Penelitian	53
---------------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah	55
1. Kondisi Geografis, Demografis, dan Luas Wilayah.	55
a. Letak geografis.	56
b. Topografi.	57
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.....	57
3. Tugas Pokok dan Fungsi Desa Padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.....	60
a. Tugas Pokok dan Fungsi Desa Padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang	60
4. Struktur Organisasi Desa Padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.....	61
a. Struktur Organisasi Desa Padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang	61
b. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Desa Padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang	64
5. Struktur Organisasi Kelembagaan Kesehatan Desa.....	69
6. Visi dan Misi Desa Padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.....	70
a. Visi.....	70
b. Misi.....	72
7. Susunan Kepegawaian Desa Padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.....	73
8. Keadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa Padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang	74
B. Karakteristik Sasaran Penelitian.....	76
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	78
1. Efektivitas Program Pencegahan Stunting Di Desa Padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang	78

2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Efektivitas Program Pencegahan Stunting di Desa Padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.....	113
3. Upaya-upaya yang di lakukan dalam Efektivitas Program Pencegahan Stunting di Desa Padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.....	140

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	162
B. Saran	163

DAFTAR PUSTAKA..... 169

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Stanting Di Desa Padasari	4
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	38
2.2 Kisi-Kisi Pertanyaan Penelitian	44
3.1 Sasaran Penelitian	49
3.2 Informan Penelitian	50
3.3 Jadwal Kegiatan Penelitian	54
4.1 Jumlah Pegawai Desa Padasari berdasarkan jenis kelamin	73
4.2 Jumlah Pegawai Desa Padasari Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	74
4.3 Keadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa Padasari	74
4.4 Keadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Desa Padasari	75
4.5 Hasil Wawancara	81
4.6 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	83
4.7 Hasil Wawancara	85
4.8 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	86
4.9 Hasil Wawancara	88
4.10 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	90
4.11 Hasil Wawancara	92
4.12 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	93
4.13 Hasil Wawancara	96
4.14 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	97
4.15 Hasil Wawancara	99
4.16 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	100

4.17 Hasil Wawancara	102
4.18 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	104
4.19 Hasil Wawancara	106
4.20 Triangulasi Teknik Pengumpulan	107
4.21 Hasil Wawancara	110
4.22 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	111
4.23 Rekapitulasi.....	112
4.24 Hasil Wawancara	115
4.25 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	116
4.26 Hasil Wawancara	118
4.27 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	119
4.28 Hasil Wawancara	120
4.29 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	121
4.30 Hasil Wawancara	123
4.31 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	124
4.32 Hasil Wawancara	125
4.33 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	127
4.34 Hasil Wawancara	128
4.35 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	130
4.36 Hasil Wawancara	131
4.37 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	133
4.38 Hasil Wawancara	134
4.39 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	136

4.40 Hasil Wawancara.....	137
4.41 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	138
4.42 Rekapitulasi.....	139
4.43 Hasil Wawancara	141
4.44 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	142
4.45 Hasil Wawancara	144
4.46 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	145
4.47 Hasil Wawancara	146
4.48 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	147
4.49 Hasil Wawancara	149
4.50 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	149
4.51 Hasil Wawancara	151
4.52 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	152
4.53 Hasil Wawancara	153
4.54 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	154
4.55 Hasil Wawancara	155
4.56 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	156
4.57 Hasil Wawancara	158
4.58 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	158
4.59 Hasil Wawancara	160
4.60 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	160
4.61 Rekapitulasi.....	161

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Bagan Kerangka Pemikiran.....	43
3.1 Desain Penelitian.....	48
4.1 Struktur Organisasi Desa Padasari.....	63
4.2 Struktur Organisasi Kelembagaan Kesehatan Desa.....	69



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Ketua STIA Sebelas April Sumedang Nomor :
539/SK/D-STIA/UN/K/XI/2019 Tentang Penempatan Mahasiswa
Penyusunan Skripsi, Judul Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi
tahun Akademik 2019/2020.
- Lampiran 2 Surat permohonan Izin observasi Nomor 818/D-
STIA/UN/K/IX/2019
- Lampiran 3 Pedoman Observasi
- Lampiran 4 Pedoman Dokumentasi
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 Jawaban Hasil Wawancara
- Lampiran 7 Berita Acara Bimbingan
- Lampiran 8 Dokumentasi Foto
- Lampiran 9 Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Stunting adalah sebuah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang tinggi badannya jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan anak seusianya akibat kekurangan gizi. Stunting merupakan permasalahan yang semakin banyak ditemukan di Negara berkembang, termasuk Indonesia. Hasil riset kesehatan dasar (RISKEDAS) 2018 menunjukkan bahwa bayi usia dibawah lima tahun (Balita) yang menderita stunting mencapai 30,8%, sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi 27,67%. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan angka stunting di Indonesia selama ini belum menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan.

Anak dengan status gizi stunting akan mengalami gangguan pertumbuhan hingga masa remaja sehingga pertumbuhan anak lebih rendah dibandingkan remaja normal. Remaja yang stunting berisiko mendapatkan penyakit kronik salah satunya adalah obesitas. Remaja stunting berisiko obesitas dua kali lebih tinggi daripada remaja yang tinggi badannya normal.

Obesitas terutama disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor genetik meskipun diduga juga berperan tetapi tidak dapat menjelaskan terjadinya peningkatan obesitas, pengaruh faktor lingkungan terutama terjadi melalui ketidakseimbangan antara pola makan, perilaku makan dan aktivitas fisik.

Program pencegahan stunting merupakan salah satu program pembangunan nasional yang termasuk kedalam pembangunan kesehatan. Pembangunan

kesehatan yang kokoh dimulai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, untuk itu perlu mempersiapkan sejak dini termasuk pada usia sekolah. Salah satu indikator dalam pencapaian pembangunan kesehatan adalah status gizi anak usia dibawah 5 tahun (balita).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 42/2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tercantum dalam RPJMN 2015-2019, Peraturan menteri kesehatan No 23 tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi, Peraturan Menteri Keuangan No 61/PMK.07/2019 tentang Pengalokasian Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi.

Regulasi tersebut menjadi acuan Program Pencegahan Stunting berskala nasional. Pencegahan stunting termasuk ke dalam salah satu yang difokuskan dalam pembangunan kesehatan dikarenakan pertumbuhan di usia dini adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Karena salah satu penyebab dari stunting yaitu bisa timbul dari faktor lingkungan, juga dari makanan yang dikonsumsi, baik dilihat dari sumber gizinya atau vitaminyanya. Dengan melihat persentase angka peningkatan stunting, maka saat ini di Indonesia digencarkan di tiap-tiap daerah dengan berdasarkan pengawasan pemerintah. Salah satunya yaitu di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

Kabupaten Sumedang merupakan satu dari 60 kabupaten dengan kasus stunting yang tinggi. Tingginya kasus stunting di Kabupaten Sumedang menjadikan acuan pemerintah untuk lebih memfokuskan terhadap keberhasilan pembangunan di kabupaten sumedang khususnya pembangunan kesehatan. Saat

ini Kabupaten Sumedang sedang menggencarkan program pencegahan stunting di tiap-tiap desa.

Desa Padasari adalah salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang yang diberikan keleluasaan dalam membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan salah satunya pembangunan kesehatan dalam upaya pencegahan stunting yaitu untuk kemajuan desa dan kepentingan masyarakatnya.

Kegiatan pembangunan kesehatan di Desa Padasari pada tahun 2019 ini seperti halnya yang dilakukan oleh Desa-desa serupa yang ada di Indonesia dengan memanfaatkan potensi yang ada seperti, pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan bayi dan balita, pembangunan sanitasi air, pembangunan Rumah Tidak layak huni (RUTILAHU), pembangunan tempat saluran air bersih, penyuluhan tentang reproduksi remaja, penyuluhan KB, termasuk pencegahan stunting.

Program pencegahan stunting yang dilaksanakan oleh aparatur Desa khususnya oleh kader posyandu Desa padasari serta peran dari pihak puskesmas yang dilakukan sejak tahun 2016 meliputi, penyuluhan untuk ibu hamil (pelayanan kesehatan ibu hamil), pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, pemberian makanan untuk bayi dan balita, serta penyuluhan kepada remaja menyangkut obesitas dan upaya pencegahan yang harus dilakukan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan remaja tentang upaya pencegahan stunting.

Berdasarkan peraturan menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana Desa tahun

2019 diprioritaskan salah satunya untuk mempercepat pencegahan stunting di Desa. Sebab itu Desa sangat terlibat dalam program pencegahan stunting karena desa mempunyai anggaran yang sangat leluasa untuk dialokasikan dalam program pencegahan stunting tersebut. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dan peran serta pemerintah Desa merupakan tombak keberhasilan upaya pencegahan stunting di Desa yang secara langsung akan berdampak pada penanggulangan kemiskinan. Untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan pencegahan stunting sebagai bagian dari kegiatan pembangunan Desa yang di prioritaskan untuk di biayai dengan anggaran Desa khususnya dari Dana Desa.

Dengan ketepatan-ketepatan sasaran, bahwa tujuan lebih berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya strategik, penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan sehingga sangat menentukan keberhasilan aktivitas dalam pencegahan stunting, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan program pencegahan stunting di Desa Padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

Tabel 1.1
Data Stunting di Desa Padasari

No	Dusun	Jumlah Anak
1	Dusun Bambayang	12 Anak
2	Dusun Mulyasari	11 Anak
Total		23 Anak

Sumber : *Bidan Desa Padasari*

Dari tabel diatas dapat diketahui data stunting di Desa Padasari masih menunjukkan angka stunting yang cukup tinggi, banyaknya balita yang mengalami stunting disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap gizi balita, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan serta tidak menjaga

kebersihan makanan. Selama ini sebagian masyarakat Desa Padasari salah kaprah mengenai stunting. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dianggap sebagai faktor keturunan (genetik), sehingga orangtua hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya.

Sebagian masyarakat juga menganggap stunting hanya terjadi pada anak dari keluarga miskin, padahal stunting juga bisa terjadi pada anak keluarga dikota maupun di Desa. Untuk itulah pemerintah Desa Padasari mengadakan berbagai program dan aktivitas yang disiapkan pemerintah untuk mencegah stunting yaitu melatih para petugas kesehatan dan kader posyandu agar mampu mendidik masyarakat dalam upaya pencegahan stunting. Salah satu tujuan diadakan program pencegahan stunting untuk memberikan acuan bagi pemangku kepentingan di Desa untuk efektivitas pencegahan stunting di Desa.

Efektivitas merupakan sebuah pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang sudah ditentukan. Sedangkan suatu program dapat dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas suatu program dapat dilihat dari bagaimana pemanfaatan sumber daya, sarana prasarana, sasaran yang tepat, peralatan dan perlengkapan yang menunjang. Oleh sebab itu efektivitas dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.

Efektivitas program pencegahan stunting dapat menjadikan tolak ukur untuk melihat berhasil atau tidaknya suatu program pembangunan kesehatan.

Suatu program atau kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberikan dampak, hasil atau manfaat yang diinginkan. Sama halnya dengan program pencegahan stunting, dapat dikatakan efektif apabila dapat mencegah stunting itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan beberapa indikasi yang mengarah pada belum optimalnya efektivitas program Stunting dalam upaya mencegah timbulnya penderita stunting di Desa Padasari Kecamatan Cimalaka kabupaten Sumedang. Adapun indikasi-indikasi permasalahannya sebagai berikut.

1. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk program pencegahan awal Stunting. Sehingga berdampak pada sulitnya masyarakat untuk mengakses ke tempat tersebut. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya kendaraan desa siaga dan fasilitas kesehatan di setiap posyandu yang masih kurang memadai. Ini selaras dengan informasi yang saya terima dari Kader Posyandu di Wilayah Desa Padasari.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penanganan awal stunting. Bisa dilihat dari terbatasnya pemahaman masyarakat dalam pengetahuan kesehatan. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dipaparkan saat wawancara bersama Kepala Desa Padasari
3. Belum maksimalnya pendampingan dan pemantauan dari instansi pemerintah. Sehingga kurangnya koordinasi maupun evaluasi dalam menyusun program pencegahan Stunting. Hal ini bisa dilihat dari kurangnya pengawasan dan evaluasi dari pihak terkait setelah peneliti berwawancara dengan Bidan desa.

Berdasarkan data yang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **EFEKTIVITAS PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING DI DESA PADASARI KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG** “

B. FOKUS MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka terumuskan fokus masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Efektivitas program pencegahan Stunting di Desa padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan program pencegahan Stunting di Desa padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan pelaksanaan program pencegahan Stunting di Desa padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dilihat dari identifikasi masalah di atas, peneliti dapat menemukan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui efektivitas program pencegahan Stunting di Desa padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan program pencegahan Stunting di Desa padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang

3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan program pencegahan Stunting di Desa padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat berguna untuk berbagai pihak terkait baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Kegunaan secara teoritis yaitu agar hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau nilai tambah bagi pengembangan konsep-konsep dan teori-teori, dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam suatu kebijakan dan perbaikan-perbaikan dalam hal Efektivitas Program Pencegahan Stunting.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk disajikan sebagai bahan masukan terhadap Desa Padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para peneliti selanjutnya yang berminat untuk secara mendalam tentang permasalahan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakekat Administrasi

1. Pengertian Administrasi

Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik.

Selanjutnya Silalahi (2007: 5) mengemukakan administrasi dalam arti sempit, yaitu sebagai berikut:

Administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain.

Menurut Jimmy (2015: 21) mengemukakan bahwa “administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu”.

Sedangkan Menurut Akadun (2009: 18) mengemukakan bahwa:

Secara sempit, administrasi diartikan sebagai pekerjaan-pekerjaan klerikal atau ketatausahaan. Secara luas administrasi adalah proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan keorganisasian. Bahkan administrasi juga dapat diartikan sebagai pendayagunaan atau pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan keorganisasian.

Dari definisi tersebut, ditarik kesimpulan bahwa administrasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan kerjasama mulai penyelenggaraan kegiatan baik secara formal maupun informal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Pengertian Administrasi Negara

Administrasi negara merupakan salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan dan salah satu bagian pula dari ilmu administrasi yang erat kaitannya dengan proses politik, terutama dengan perumusan berbagai kebijakan negara. Oleh karena itu administrasi negara sangatlah berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula pada tingkat implementasi kebijakan. Karena memang administrasi negara berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan politik.

Menurut Mariati Rahman (2017: 17) mengemukakan “Administrasi Negara/ publik adalah seluruh tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”.

Menurut Juharni (2015: 1) bahwa “Administrasi Negara (*public Administration*) adalah suatu “*species*” dalam lingkup “*genus*” administrasi (*administration*) yang bermakna sebagai kegiatan manusia yang kooperatif”.

Sedangkan menurut Dina Susiani (2019: 2) mengemukakan bahwa “Ilmu Administrasi negara (*public administration*) dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kegiatan kerja sama dalam organisasi atau institusi yang bersifat publik yaitu negara”.

Dapat disimpulkan bahwa administrasi negara adalah suatu proses melibatkan beberapa orang dengan berbagai keahlian dan kecakapan melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah.

3. Ciri-ciri Administrasi Negara

Ciri-ciri administrasi negara yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi administrasi negara menurut Thoha (2014: 62-63) sebagai berikut:

1. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara lebih urgen dibandingkan pelayanan yang diberikan oleh organisasi-organisasi swasta. Urgensi pelayanan ini karena menyangkut kepentingan semua lapisan masyarakat, dan kalo diserahkan atau ditangani oleh organisasi-organisasi lainnya selain organisasi pemerintah maka akan tidak jalan.
2. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara pada umumnya bersifat monopoli. Dalam hal ini bentuk pelayanan yang diberikan tidak dapat dibagi kepada organisasi-organisasi lainnya.
3. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum administrasi negara dan administratornya relatif berdasarkan undang-undang dan dan peraturannya. Ciri ini memberikan warna legalistis dari administrasi negara tersebut. Sehingga dengan demikian perubahan-perubahan atau perluasan pelayanan kepada masyarakat, pada umumnya sulit atau lambat menyesuaikan diri pada tuntutan-tuntutan masyarakat. Lain halnya dengan organisasi swasta yang dengan mudah dan cepat menyesuaikan apabila didapatkan kritik atau saran dari langganan.
4. Administrasi dalam memberikan pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar, tidak seperti yang terjadi dalam organisasi perusahaan yang terikat oleh harga pasar dan untung rugi. Oleh karena itu permintaan pelayanan oleh masyarakat kepada administrasi negara tidak didasarkan oleh perhitungan laba rugi, melainkan ditentukan oleh rasa pengabdian kepada masyarakat umum.
5. Usaha-usaha yang dilakukan oleh administrasi negara terutama dalam negara demokrasi ialah dilakukan sangat tergantung pada penilaian rakyat banyak. Itulah sebabnya pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara hendaknya adil tidak memihak, proporsional, bersih, dan mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan pribadinya. Pelayanan tersebut tidak dapat melepaskan dari penilaian rakyat yang dilayani.

Selanjutnya Thoha (2014: 63-66) mengemukakan perbedaan

administrasi negara dengan institusi-institusi yang lain, yaitu:

1. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (*unavoidable*). Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara. Mulai dari lahir sampai nanti meninggalkan dunia ini, orang ini tidak bisa melepaskan dari sentuhan kegiatan administrasi negara. Baik warga negara maupun ataupun orang asing tidak juga mampu menghindar dari kegiatan administrasi negara. Demikianlah seterusnya hubungan antara orang dengan administrasi negara tidak bisa putus. Mereka bisa *give up* sewaktu-waktu, dan sebaliknya juga bisa menjalin hubungan sewaktu-waktu tergantung akan kemauannya.
2. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan. Dalam hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk menggunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang akan ditetapkan.
3. Administrasi negara mempunyai prioritas. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat. Sebab jika tidak dilakukan prioritas ini, maka akan terjadi adanya suatu kegiatan yang dapat dikerjakan secara baik, dan ada pula yang dapat mencelakakan orang banyak.
4. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas. Besar lingkup kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut, dan di udara.
5. Pimpinan atasnya (*top management*) bersifat politis. Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
6. Pelaksanaan Administrasi Negara adalah sangat sulit diukur. Oleh karena itu Administrasi Negara oleh sebagian kegiatannya bersifat politis dan tujuan diantaranya untuk mencapai perdamaian, kesehatan, pendidikan, keahlian, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah untuk diukur. Adapun yang menjadi tujuan administrasi negara ialah bagaimana tujuan-tujuan tersebut dapat dilaksanakan sehingga tercapai.
7. Banyak yang diharapkan dari Administrasi Negara. Dalam hubungan ini terdapat dua standar penilaian, yang pertama pihak masyarakat menghendaki administrasi negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka, dipihak lain administrasi

negara mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas. Moral dan etika pejabat administrasi negara hendaknya menunjukkan moral dan etika yang prima hukum hendaknya diterapkan kepada semua pihak tidak pandang bulu. Dan banyaknya lagi harapan masyarakat.

Berdasarkan ciri-ciri di atas Administrasi Negara dapat di simpulkan dari 2 sudut pandang yaitu dari sudut pandang pelayanan bahwa administrasi negara berorientasi pada pemberian pelayanan pemerintah atau organisasi privat yang dianggap penting dan berbeda dari pelayanan yang diberikan organisasi swasta, serta pelayanan yang diberikan bersifat monopoli dan semi monopoli. Selain pada itu pelayanan yang diberikan oleh administrator pun harus memiliki landasan hukum berupa undang-undang ataupun peraturan serta pelayanan-pelayanan yang diberikan berorientasi pada kepentingan umum atau rakyat. Sedangkan dari sudut pandang Administrasi Negara dengan institusi-institusinya bahwa Administrasi Negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari, administrasi negara mempunyai monopoli untuk menggunakan wewenang dan kekuasaan untuk warga negara mematuhi peraturan-peraturan perundangan, serta kegiatan administrasi bersifat politis dan tujuannya untuk mencapai perdamaian, kesehatan, pendidikan, kemakmuran, dan lain-lain. Dengan demikian dalam hubungan ini terdapat dua standar penilaian, yang pertama pihak masyarakat menghendaki administrasi negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti pelayan publik, dipihak lain admininistrasi negara mempunyai kemampuan, keahlian, dan sumber-sumber yang terbatas untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang telah di tetapkan.

4. **Administrasi Negara Dipandang Sebagai Suatu Sistem**

Sistem adalah seperangkat komponen elemen, unsur atau subsistem dengan segala atributnya, yang satu sama lain berkaitan, mempengaruhi dan saling ketergantungan sehingga membentuk suatu kesatuan yang terintegrasi atau suatu totalitas, serta mempunyai peranan atau tujuan tertentu. Secara elementer, administrasi terjadi apabila dua orang atau lebih bekerja sama melakukan kegiatan tertentu dengan sarana tertentu untuk mencapai tujuan bersama.

Dari pandangan administrasi negara sebagai suatu sistem maka administrasi ialah proses penyelenggaraan kebijaksanaan negara/pemerintah dalam rangka mencapai tujuan negara. Bahwa administrasi negara memiliki bentuk-bentuk kegiatan yang bervariasi tergantung pada tingkat kepentingan dan wewenang yang dimiliki administratornya.

B. **Hakekat Kebijakan**

1. **Pengertian Kebijakan**

Kata kebijakan (*policy*) pada umumnya dipakai untuk menunjukkan pilihan terpenting yang diambil baik dalam kehidupan organisasi maupun privat, kebijakan bebas dari konotasi yang dicakup dalam kata politis (*political*) yang diyakini mengandung makna “keberpihakan” dan Korupsi.

Pengertian kebijakan secara etimologis di kemukakan Duun (2003: 51):

bahwa istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta yaitu *polis* (Negara-kota) dan dikembangkan dalam bahasa Inggris menjadi *police*, yang berarti kegiatan menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.

Makmur (2011: 11) juga mengemukakan bahwa: “Kebijakan adalah suatu bentuk keputusan yang mengikat bagi orang tertentu atau dengan kata lain orang banyak dengan tataran strategis dan mengarah kepada yang lebih bersifat mengandung garis besarnya saja terhadap sesuatu yang dibuat oleh pemegang otoritas publik dan otoritas privat”.

Sedangkan menurut Kristian Widya (2006: 55) bahwa:

kebijakan dapat dinyatakan sebagai perilaku, bertujuan (*pruposive behavior*) meskipun sebuah pernyataan tujuan dapat menjadi topeang terhadap maksud yang sesungguhnya dan rasionalisasi atas inisiatif kebijakan dan hasil dapat hadir setelah keputusan dilibat dan tindakan diambil.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu konsep atau suatu keputusan yang dibuat oleh Negara a. Kebijakan itu berada dalam berbagai aspek kehidupan manusia mulai dari kehidupan individu, kelompok, sampai kepada aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan organisasi sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Secara umum kebijakan publik adalah alat untuk mewujudkan nilai-nilai yang diidealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan, dan keterbukaan. Oleh karena itu suatu program merupakan turunan dari kebijakan publik.

Menurut Hayat (2018: 13) bahwa “Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik”.

Menurut Riant Nugroho (2004: 4) mengemukakan bahwa “Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah”.

Sedangkan menurut makmur (2011: 72) bahwa kebijakan publik adalah suatu bentuk ketentuan atau peraturan yang ditetapkan oleh pejabat publik baik pejabat politik maupun pejabat karier yang bertujuan untuk menciptakan pengaturan dan keteraturan masyarakat dalam rangka melakukan berbagai aktivitas masing-masing.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan dan di tetapkan oleh pemerintah untuk melakukan penanganan terhadap masalah-masalah guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Analisis Kebijakan Publik

Menurut Duun (2003: 1) bahwa analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan.

Menurut Nugroho (2004: 84) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah sebuah bentuk kajian terapan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dari isu-isu sosial untuk dapat dikedepankan sebuah solusi yang lebih baik, serta proses intelektual yang mengawali perumusan kebijakan yang biasanya bersifat politis.

Sedangkan Menurut Ali dan Alam (2012: 122) bahwa Analisis kebijakan adalah ilmu pengetahuan terapan yang menggunakan berbagai ilmu metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan tentang kebijakan sehingga dapat

dimanfaatkan ditingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Maka dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan sangat penting dalam pemecahan suatu program yang dihadapi oleh masyarakat dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Sehingga untuk menganalisis kebijakan publik, sangat dibutuhkan suatu pengetahuan tentang dasar dan analisis dalam pembuatan suatu kebijakan.

Langkah-langkah analisis kebijakan dimaksudkan sebagai suatu proses penelitian dan atau penganalisaan yang melibatkan komponen-komponen informasi kebijakan, yang dipindahkan dari satu posisi ke posisi berikutnya melalui penggunaan berbagai metode. Secara sederhana langkah-langkah dalam melakukan analisis kebijakan menurut Mustopadidjaja (2003: 26-29) adalah sebagai berikut:

1. Pengkajian persoalan
2. Penentuan tujuan
3. Perumusan alternatif
4. Perumusan model
5. Penentuan kriteria
6. Penilaian alternatif
7. Perumusan rekomendasi

4. Perumusan Kebijakan Publik

Perumusan (*formulasi*) kebijakan publik merupakan salah satu tahap dari rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Bahwa kebijakan publik ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri.

Menurut Riant Nugroho (2004:101) mengemukakan bahwa “Perumusan kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik karena disini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri”.

Menurut Duun (2000: 132) bahwa perumusan kebijakan (*policy formulatin*) adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah.

Sedangkan menurut Winarno (2002: 29) menyatakan bahwa “masing-masing alternatif bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk memecahkan masalah”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan merupakan cara untuk memecahkan suatu masalah yang dibentuk oleh para pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang ada dan dari sekian banyak alternatif pemecahan yang ada maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik.

C. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan karena kebijakan publik yang telah dibuat akan bermanfaat jika diimplementasikan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan atau tindakan yang mampu untuk mencapai tujuan kebijakan.

Menurut Budi Winarno (2008: 145) bahwa “Implementasi kebijakan menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah”.

Menurut Erwin Zubair dan Yosep P. Koton (2016: 31) mengemukakan bahwa “Implementasi kebijakan adalah suatu tindakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”.

Selanjutnya menurut Sunggono (1994: 137) mengemukakan bahwa “implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu”.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menerapkan sesuatu yang dianggap dapat memecahkan suatu permasalahan dan untuk mencapai tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri.

2. Tahapan-tahapan Implementasi Kebijakan Publik

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan Islamy (1997: 102) membagi tahapan implementasi dalam 2 bentuk, yaitu:

- a. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
- b. Bersifat *non-ececunting*, yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Menurut Erwan Agus Purwanto (2015: 22) mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut:

- a. Tahap 1: *Agenda Setting*, yang berarti setiap kebijakan publik yang dirumuskan memang akan selalu dimulai dari adanya suatu masalah publik yang mendapat perhatian luas yang menuntut tindakan pemerintah untuk memecahkan masalah tersebut melalui suatu kebijakan.
- b. Tahap 2: Formulasi Kebijakan, yaitu proses penyusunan rencana serta metode untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam agenda setting.
- c. Tahap 3: Implementasi
- d. Tahap 4 dan 5: Evaluasi kebijakan dan penyempurnaan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tahapan-tahapan kebijakan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (target grup) tetapi memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implementasi kebijakan negara.

3. Faktor Yang Berpengaruh Dalam Implementasi Kebijakan

Menurut Sunggono (1994: 149) implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor yang berpengaruh yang perlu diperhatikan untuk mengimplementasikan kebijakan, pengaruh tersebut dapat menjadi hambatan maupun faktor pendukung implementasi kebijakan, yaitu:

1. Isi kebijakan
 - a. Pertama, implementasi kebijakan publik dapat gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penetapan prioritas, atau

program-program kebijakan yang terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

- b. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun eksteren dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
 - c. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekeurangan-kekurangan yang sangat berarti.
 - d. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena adanya kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana, dan tenaga manusia.
2. Informasi
Implementasi kebijakan publik mengansumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik.
 3. Dukungan
Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
 4. Pembagian potensi
Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku (aktor) yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Maka suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain perbuatan dan tindakan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

4. Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan publik dilakukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik untuk dipertanggung jawabkan kepada publiknya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Sunggono (1994: 159) mengemukakan bahwa:

Evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dari suatu proses kebijakan. Sebagai salah satu aktivitas fungsional, suatu evaluasi kebijakan tidak hanya dilaksanakan dengan mengikuti aktivitas-aktivitas kebijakan sebelumnya, yaitu persetujuan dan pengesahan, serta pelaksanaan kebijakan, akan tetapi dapat dilakukan aktivitas-aktivitas fungsional yang lain dalam proses kebijakan.

Menurut Annas (2017:50) bahwa “Kebijakan publik adalah penilaian objektif dan sistematis dari desain, pelaksanaan, dan hasil dari kebijakan, program, atau kegiatan yang sedang berlangsung atau telah selesai”.

Sedangkan menurut Rizani (2019:46) bahwa evaluasi kebijakan adalah hasil dari kebijakan yang pada kenyataannya mempunyai hasil tujuan atau sasaran kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan suatu penilaian objektif dan sistematis yang tidak hanya dilaksanakan mengikuti aktivitas-aktivitas kebijakan, dan pada kenyataannya evaluasi kebijakan ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai.

b. Kriteria Evaluasi kebijakan

Selanjutnya Duun (2003: 610) mengemukakan bahwa terdapat 4 tipe kriteria evaluasi kebijakan:

1. Efektivitas (*effectiveness*): suatu kriteria untuk menyeleksi berbagai alternatif untuk dijadikan rekomendasi yang didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang merekomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi.
2. Efisiensi (*efficiency*): suatu kriteria untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut membuahkan hasil yang rasio efektivitas biayanya lebih tinggi dari batas tertentu (efisiensi marginal).
3. Kecukupan (*adequacy*): kriteria yang di gunakan untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan melihat seberapa jauh alternatif tersebut dapat memenuhi suatu tingkat kebutuhan yang dipermasalahkan.
4. Perataan (*equity*): suatu kriteria untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pada pertimbangan apakah alternatif direkomendasikan tersebut menghasilkan lebih banyak retribusi yang adil atau wajar terhadap risorsir yang ada di masyarakat.

5. Hambatan-hambatan dalam Implementasi kebijakan

Menurut Sunggono (1994: 149-153) bahwa implementasi kebijakan mempunyai beberapa hambatan yang perlu diperhatikan untuk mengimplementasikan kebijakan, pengaruh tersebut dapat menjadi hambatan maupun faktor pendukung implementasi kebijakan yaitu:

a) Isi Kebijakan

Dalam pelaksanaan implementasi Sunggono (1994: 145) mengemukakan “implementasi kebijakan (publik) merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan

menjadi kenyataan”. Namun dalam implementasi kebijakan masih belum berjalan dengan baik dikarenakan isi kebijakan memiliki beberapa permasalahan diantaranya, yaitu:

- a. Pertama, implementasi kebijakan publik dapat gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penetapan prioritas, atau program-program kebijakan yang terlalu umum atau sama sekali tidak ada.
- b. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun eksteren dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
- c. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.
- d. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena adanya kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana, dan tenaga manusia.

b) Informasi

Implementasi kebijakan publik mengansumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru sering tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan dalam struktur komunikasi.

Informasi dalam mengimplementasikan kebijakan berhubungan dengan informasi pemerintah, yakni menetapkan aturan di mana penyedia

informasi pribadi dan media beroperasi. Dari penjelasan tersebut bahwa informasi memiliki beberapa tipe yaitu informasi sebagai sumber daya, komoditas, persepsi pola wadah sebagai kemungkinan yang ada, agen dan kekuatan konstitusi masyarakat. Berbagai tipe ini berguna untuk berbagai tahap menganalisa bagian tertentu dari kebijakan pada saat pemberian informasi.

c) Dukungan

Dalam mengimplementasikan suatu program tentu harus adanya dukungan dari berbagai pihak agar pelaksanaan suatu implementasi program dapat berjalan dengan baik. Karena dukungan merupakan bentuk dorongan, semangat, kepedulian, kesediaan dalam suatu lingkungan, sehingga segala sesuatu yang diberikan akan memberikan keuntungan yang berpengaruh pada tingkah laku penerima. Sehingga proses pelaksanaan bisa berjalan dengan baik.

Maka pelaksanaan kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d) Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku (aktor) yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang

dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Oleh karena itu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain tindakan dan perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah atau negara, sehingga suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

6. Upaya-upaya mengatasi hambatan implementasi kebijakan

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana lainnya.

Adapun upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Isi Kebijakan

Upaya dalam mengatasi hambatan tentang isi kebijakan bahwa isi kebijakan perlu adanya beberapa faktor pendukung untuk melihat keberhasilan suatu program yang diimplementasikan yaitu, kepentingan dari isi kebijakan program tersebut karena suatu kebijakan dalam pelaksanaannya melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh kepada pengimplementasiannya. Jenis dan manfaat dari program tersebut yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan implementasi (program), selain itu

juga kebijakan yang dijalankan harus memiliki tujuan yang hendak dicapai melalui implementasi kebijakan yang harus mempunyai skala yang jelas.

2. Informasi

Dalam mengatasi hambatan komunikasi cara untuk mengatasinya yaitu dengan melakukan tindakan dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai pesyaratan, tujuan menghilangkan pilihan dari multi interpretasi atau penafsiran informasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terperinci.

3. Dukungan

Proses implementasi tentu harus adanya dukungan untuk mengatasi hambatan diatas, salah satunya yaitu fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

4. Pembagian Potensi

Dalam mengatasi hambatan ini, adapun upaya-upaya untuk mengatasinya yaitu dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Maka hal ini harus terpapar dengan baik. Pelaksanaan kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya yang baik dan pembagian tugas yang baik dan pembagian tugas yang merata serta menjalankan tugasnya dengan baik sesuai

dengan tanggung jawab yang diberikan oleh pelaksana program agar proses pelaksanaan implementasi ini berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

D. Efektivitas Program

1. Pengertian Efektivitas

Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Padahal suatu tujuan atau saran yang telah tercapai sesuai dengan rencana dapat dikatakan efektif, tetapi belum tentu efisien. Walaupun terjadi suatu peningkatan efektivitas dalam suatu organisasi maka belum tentu itu efisien. Jelasnya, jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya dapat dikatakan efektif. Jadi bila suatu pekerjaan itu tidak selesai sesuai waktu yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan tidak efektif. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi.

Menurut Lysa dan Yusliati (2018: 13) bahwa secara umum “Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

Menurut Nonci (2017: 45) mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah seperangkat indikator yang bermakna tentang target pada suatu program, atau tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya, dan diusahakan agar terealisasi dengan baik”.

Menurut Wira (2015: 43) menemukan bahwa:

Efektivitas dapat digunakan untuk mengukur suatu kerja organisasi karena efektivitas merupakan kemampuan untuk dapat memilih tujuan yang terpantau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pelaksanaan pekerjaan atau program didalam organisasi dikatakan efektif apabila dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan dengan cara yang tepat untuk mencapai tujuan.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran tercapainya indikator-indikator yang telah ditentukan, seperti sasaran, tujuan, pementauan program. Jadi apabila indikator-indikator tersebut telah dicapai, baru dapat dikatakan efektif.

2. Ukuran-ukuran Efektivitas

Sedangkan Streets (1985: 41) telah berhasil mengidentifikasi hasil studi para ahli mengenai ukuran-ukuran efektivitas organisasi, diantaranya pengukuran efektivitas dengan model multivariasi, maka kriteria yang paling menonjol dalam pengukuran efektivitas organisasi antara lain:

- a. Kemampuan beradaptasi;
- b. Produktivitas;
- c. Kepuasan;
- d. Daya laba;
- e. Mendapatkan sumber daya;
- f. Ketiadaan ketegangan;
- g. Pengendalian Lingkungan;
- h. Pengembangan;
- i. Efisiensi;
- j. Kebetahan bekerja;
- k. Pertumbuhan;
- l. Integrasi;
- m. Komunikasi terbuka;
- n. Kelangsungan hidup;
- o. kriteria lainnya.”

Sementara menurut Robbins (1994: 51-59) menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur dalam tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan tujuan, dengan anggapan bahwa tujuan merupakan ukuran efektivitas organisasi.
2. Pendekatan Sistem, dengan anggapan bahwa kelangsungan hidup dan perkembangan organisasi bergantung pada kemampuannya menghasilkan produksi barang dan jasa yang dibutuhkan lingkungannya. Pendekatan sistem ini lebih bersifat makro karena efektivitas mencakup baik aspek organisasi maupun aspek lingkungannya.
3. Pendekatan konstituasi-strategis, yang didasari pada berbagai pihak yang berkepentingan dalam kinerja organisasi, seperti:
 - 1) Pimpinan organisasi berharap organisasi berjalan sesuai tujuan yang telah di tetapkan,
 - 2) Pemilik iinnin memperoleh provit,
 - 3) Manajer dan karyawan berharap memiliki penghasilan yang tinggi,
 - 4) Kreditur berharap organisasi mampu memenuhi kewajibannya,
 - 5) Pemasok berkenginan organisasi lancar melakukan pembayaran,
 - 6) Pemerintah berharap organisasi taat pada peraturan yang telah ditetapkan,
 - 7) Pelanggan dapat dilayani dengan baik oleh organisasi.

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli dengan berbagai pandangan yang berbeda mengenai konsep efektivitas organisasi. Dengan demikian dapat di ambil garis besarnya bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah kesesuaian antara tujuan awal yang telah direncanakan dengan hasil akhir yang di dapat.

3. Pengertian Efektivitas program

Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Pengertian efektivitas program menurut dirokrat jenderal pembinaan pelatihan dan produktivitas departemen ketenaga kerjaan Setiawan (2005: 74) bahwa: “efektivitas program merupakan penilaian

terhadap tingkat kesesuaian program yang merupakan salah satu cara untuk mengukur efektifitas program. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program.

Menurut Noci (2017: 45) mengemukakan bahwa: “Efektivitas program merupakan capaian yang diperoleh atau kondisi akhir output dari suatu pekerjaan atau program, dengan kata lain sebagai suatu pengukuran akan tercapainya target atau tujuan secara matang yang telah di rencanakan sebelumnya”.

Sedangkan tulus dalam tangkilisan (2005: 64) menyatakan bahwa “Bermanfaatkah dan puaskah peserta pelatihan terhadap program pelatihan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur reaksi peserta terhadap program pelatihan”.

Dari definisi menurut ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas program adalah prosespenilaian terhadap suatu program untuk mengukur seberapa efektivitas suatu program, dimana dapat diumpamakan dalam kegiatan program pelatihan. Suatu program pelatihan dikatakan sukses dapat dilihat dengan ilakukannya pengukuran terhadap reaksi peserta program.

4. Ukuran Efektivitas Program

Sementara Budiani (2007: 52) mengatakan mengenai ukuran efektivitas Program, sebagai berikut:

A. Ketetapan Sasaran

Kemampuan seseorang untuk mengarahkan suatu gerak ke sasaran atau target sesuai dengan kemampuannya yang berkaitan dengan sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kelompok

sasaran menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam mengukur efektivitas suatu program karena untuk mengetahui kesesuaian program-program yang telah dibuat oleh suatu lembaga kepada kelompok-kelompok sasaran.

B. Sosialisasi Program

Bahwa peran penyelenggara program sangat penting, salah satunya adalah sosialisasi dari penyelenggara program kepada masyarakat terutama pelaksana program. Sehingga informasi tentang pelaksanaan program dapat terlaksanakan dengan jelas, informasi tentang pelaksanaan program dapat tersampaikan dengan jelas, informasi tentang program sangat penting untuk disampaikan kepada sasaran sehingga program akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

C. Tujuan Program

Tujuan program ini berkaitan dengan sejauh mana hasil data program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dari adanya program pencegah stunting yaitu upaya mengurangi angka Anak kekurangan gizi, mengurangi angka kemiskinan, dengan cara mensejahterakan masyarakat dengan cara memberikan sosialisasi dan penanganan pencegahan stunting.

D. Pemantauan Program

Pemantauan program ini diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan setelah adanya program sebagai bentuk perhatian terhadap program atau suatu program yang sudah terlaksanakan, apakah sudah berjalan dengan baik atau malah sebaliknya

E. Kaitan Administrasi Negara Dengan Efektivitas Program

Administrasi Negara merupakan salah satu bagian dari Ilmu Administrasi yang erat kaitannya dengan proses politik, terutama kaitannya dengan perumusan berbagai kebijakan negara, sehingga Administrasi Negara itu sudah dikenal sejak peradaban sistem politik disuatu negara. Oleh karena itu, administrasi negara sangatlah berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula pada tingkat implementasi kebijakan, karena memang administrasi negara berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan politik.

Hal tersebut dapat dipahami, karena berdasarkan perkembangan paradigma administrasi, administrasi negara berasal dari ilmu politik yang ditujukan agar proses kegiatan kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam kondisi politik, administrasi negara sangat berperan dalam perumusan kebijakan negara, hal ini sesuai menurut Dina Susiani (2019: 2) mengemukakan bahwa ilmu administrasi negara (*public administration*) dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kegiatan kerja sama dalam organisasi atau institusi yang bersifat publik yaitu negara.

Berdasarkan uraian diatas, birokrasi pemerintah semakain dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip efisiensi agar penggunaan sumber daya berlangsung secara optimal disektor publik, selain itu dituntut adanya keahlian administratif sehingga dengan perkataan lain, pejabat dalam administratif pemerintah dapat ditingkatkan menjadi lebihh profesional. Pengertian Administrasi Negara Menurut Mariati Rahman (2017: 17) mengemukakan administrasi Negara/ publik

adalah seluruh tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, setiap kebijakan mengandung lebih dari satu tujuan kebijakan, kebijakan publik selalu mengandung multi tujuan , yaitu untuk menjadikan kebijakan itu sebagai kebijakan yang adil dan seimbang dalam mendorong kemajuan kehidupan bersama. Dalam hal yang lebih penting lagi bagi pemerintah atau lembaga publik yaitu berkenaan dengan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan.

Sunggono (1994: 137) mengemukakan bahwa “ Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu”.

Sedangkan efektivitas dapat dikatakan sebagai ketetapan harapan, implementasi dan hasil yang dicapai. Dengan itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara efektif dimana dalam proses pelaksanaannya senantiasa menampilkan ketetapan antara harapan yang diinginkan dengan hasil yang dicapai. Sedangkan suatu program dapat dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas suatu program dapat dilihat dari bagaimana pemanfaatan sumber daya, sarana prasarana, sasaran yang tepat, peralatan dan perlengkapan yang menunjang. Oleh sebab itu efektivitas dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu efektivitas program pencegahan stunting yang dilaksanakan untuk mengurangi anak kekurangan gizi dan anak gagal tumbuh, yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Jadi kaitan administrasi negara dengan efektivitas program merupakan proses kegiatan yang dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan karena suatu efektivitas program bisa berjalan jika ada proses manajemen yang berkaitan dengan administrasi negara.

F. Tinjauan Program Pencegahan Stunting Desa

1. Dasar Pemikiran Stunting

Kedudukan stunting menempati posisi yang sangat strategis dalam pembangunan, salah satunya dalam pembangunan kesehatan karena memiliki kompetisi yang tinggi dalam mempengaruhi keberhasilan pembangunan sektor lainnya terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena stunting merupakan sarana pemenuhan kebutuhan layanan yang sangat diperlukan. Dengan adanya fungsi layanan yang berkualitas dan menjadi tumpuan masyarakat sasaran dalam pencegahan stunting. Dengan demikian pencegahan stunting telah memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pembangunan individu dan masyarakat yang sehat, cerdas, terampil, tangguh, kompetitif, sejahtera, dan bermartabat.

2. Program Pencegahan Stunting

Program pencegahan stunting adalah salah satu program yang dikembangkan dalam rangka mengurangi angka stunting (anak gagal tumbuh). Dalam program pencegahan stunting ini dapat meningkatkan partisipasi

masyarakat termasuk pemerintah Desa untuk keberhasilan mengurangi angka stunting selain itu kegiatan bimbingan dan penyuluhan terhadap orang tua untuk mencegah stunting sangat menjadi penunjang untuk keberhasilan mengurangi angka stunting, cara bimbingan dan penyuluhannya yaitu dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman agar semua orang tua mempunyai pengetahuan dan persepsi untuk mencegah stunting sejak usia dini. Orang tua dengan pengetahuan tentang pentingnya kesehatan gizi dan pencegahan stunting menjadikan pengetahuan untuk menjaga gizi seimbang pada anak usia dini. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya stunting pada anak, orang tua perlu dilakukan bimbingan dan penyuluhan tentang mengkonsumsi asupan gizi yang layak.

Dalam pencegahan stunting tersebut maka akan dapat diukur sejauh mana pemahaman masyarakat dan lembaga Desa dalam melakukan keberhasilan pencegahan stunting di Desa Padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. Keberhasilan itu akan dapat diukur dengan seberapa tingginya penurunan angka Stunting di Desa Padasari.

3. **Pelindung Program Pencegahan Stunting**

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan keluarga. Salah satunya yaitu program pencegahan stunting, pada pedoman Pelindung program Pencegahan Stunting adalah pejabat struktural dan fungsional mulai dari Bupati Kabupaten Sumedang, UPT (Unit Pelaksana Teknis), UPTD (Unit pelaksana Teknis Dinas), Kepala Dinas Kesehatan, Puskesmas, Bidan Desa, Camat Cimalaka, Kelurahan/Desa dengan Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2016

tentang Organisasi Pemerintah Desa. Sedangkan untuk pengelola program Pencegahan Stunting dilaksanakan oleh seluruh elemen pemerintahan Desa Padasari.

4. Tujuan Pencegahan Stunting

Adapun tujuan dan pembentukan Stunting Desa Padasari kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perkembangan perencanaan dan penganggaran yang dialokasikan untuk mendukung percepatan penurunan stunting.
- b. Untuk menurunkan angka Stunting Desa Padasari Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat.
- c. Serta meningkatkan sumber daya manusia generasi penerus yang cerdas dan sehat.

5. Sasaran Dalam Pelaksanaan Program Pencegahan Stunting

Sasaran yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan Pencegahan Stunting Desa Padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

1. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang baik.
2. terselenggaranya fungsi pemerintahan yang baik dalam program pelayanan kesehatan masyarakat.
3. meningkatnya pemahaman baik masyarakat maupun pemerintahan desa mengenai langkah-langkah pencegahan stunting.
4. lebih terarah dan lebih jelasnya program kesehatan masyarakat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian proposal ini penulis terlebih dahulu menggunakan penelitian terdahulu yang berupa proposal sesuai dengan judul yang peneliti ajukan, hal tersebut untuk mempermudah peneliti dalam menyusun dan mempertimbangkan penyusunan proposal.

Berikut adalah hasil-hasil penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel seperti ini:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Disusun oleh: Zia Zahrotunnis (2019)	Efektivitas program pekan olahraga kabupaten (PORKAB) dalam upaya meningkatkan prestasi atlet di komite olahraga nasional indonesia (KONI) kabupaten sumedang	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu lokus yang berbeda dan hasil penelitian yang dilihat dari pelaksanaan program tersebut.	Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang efektivitas program
2	Disusun oleh: kartika Febrim Yuliani (2017)	Efektivitas program pelayanan kesehatan gratis (P2KM) dikota Bandar Lampung	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu lokus yang berbeda	Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang efektivitas program, dan pembahasannya sama-sama menyangkut tentang kesehatan
3	Disusun oleh: Kinanti Handayani (2016)	Efektivitas program perbaikan gizi masyarakat pada bayi dan balita dikota Surakarta	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu lokus yang	Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang efektivitas

No	Nama dan Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
			berbeda	program, dan pembahasannya menyangkut perbaikan gizi pada bayi dan balita.

Berdasarkan kajian terdahulu di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan yang menjadi kebaruan dari penelitian ini. Persamaannya yaitu mulai dari variabel efektivitas program, penelitian yang membahas tentang kesehatan dan perbaikan gizi pada bayi dan balita, sedangkan perbedaannya yaitu mulai dari lokus penelitian yang berbeda dan hasil penelitian yang berbeda. Yang menjadi kebaruan dari penelitian ini yaitu penelitian efektivitas program dalam pencegahan stunting di Desa Padasari kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. Maka penulis layak untuk meneliti kembali efektivitas program pencegahan stunting di Desa Padasari karena masih banyak masalah-masalah yang terjadi seperti gagal tumbuhnya pada anak yang disebabkan kurangnya gizi dan pola hidup sehat.

H. Kerangka Pemikiran dan Pertanyaan

1. Kerangka Pemikiran

Kedudukan stunting menempati posisi yang sangat strategis dalam pembangunan kesehatan karena stunting memiliki nilai yang sangat tinggi dan sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan kesehatan yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, karena stunting telah menjadi bagian dari kesehatan manusia yang memberi andil dalam peletakan dasar pembangunan

kualitas sumberdaya manusia serta kualitas kehidupannya. Dengan demikian adanya program pencegahan stunting akan memberikan dampak yang baik untuk kesehatan masyarakat yang sehat, cerdas, sejahtera dan bahagia.

Untuk mengurangi angka stunting dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat bukanlah hal yang mudah, untuk keberhasilan kegiatan tersebut harus mendapat dukungan dari berbagai pihak serta melakukan persiapan secara maksimal dan terarah.

Keberhasilan program pencegahan stunting salah satunya dapat dilihat dari seberapa efektifnya tahap pelaksanaan program tersebut. Suatu program dikatakan berjalan dengan efektif apabila rencana yang telah dibuat sesuai dengan tujuan program atau dengan kata lain dapat diukur melalui perbandingan output atau hasil pelaksanaan program dengan rencana serta tujuan dari program tersebut. Melihat beberapa hal tersebut peneliti memiliki pemikiran bahwa program tersebut dapat dilakukan penelitian dengan mengukur efektivitas dari pelaksanaan program yang telah dilakukan oleh penyelenggara program tersebut dengan mengaplikasikan pada beberapa pengembangan pertanyaan terkait dengan efektivitas, hambatan dan upaya yang dihadapi dalam penyelenggaraan program tersebut.

“Efektivitas program merupakan capaian yang di peroleh atau kondisi akhir output dari suatu pekerjaan atau program, dengan kata lain sebagai suatu pengukuran akan tercapainya target atau tujuan secara matang yang telah di rencanakan sebelumnya”(Nurjannah Noci, 2017: 45)

Budiani (2007: 52) mengatakan mengenai ukuran efektivitas Program, sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran: yaitu kemampuan seseorang untuk mengarahkan suatu gerak ke sasaran atau target sesuai dengan kemampuannya yang berkaitan dengan sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya atau sebaliknya..
2. Sosialisasi Program: yaitu penyampaian informasi tentang pelaksanaan program, dengan penyampaian informasi yang jelas sehingga program akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
3. Tujuan Program: yaitu sejauh mana hasil data program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantauan Program: yaitu pemantauan suatu program yang sudah terlaksanakan, apakah sudah berjalan dengan baik atau malah sebaliknya.

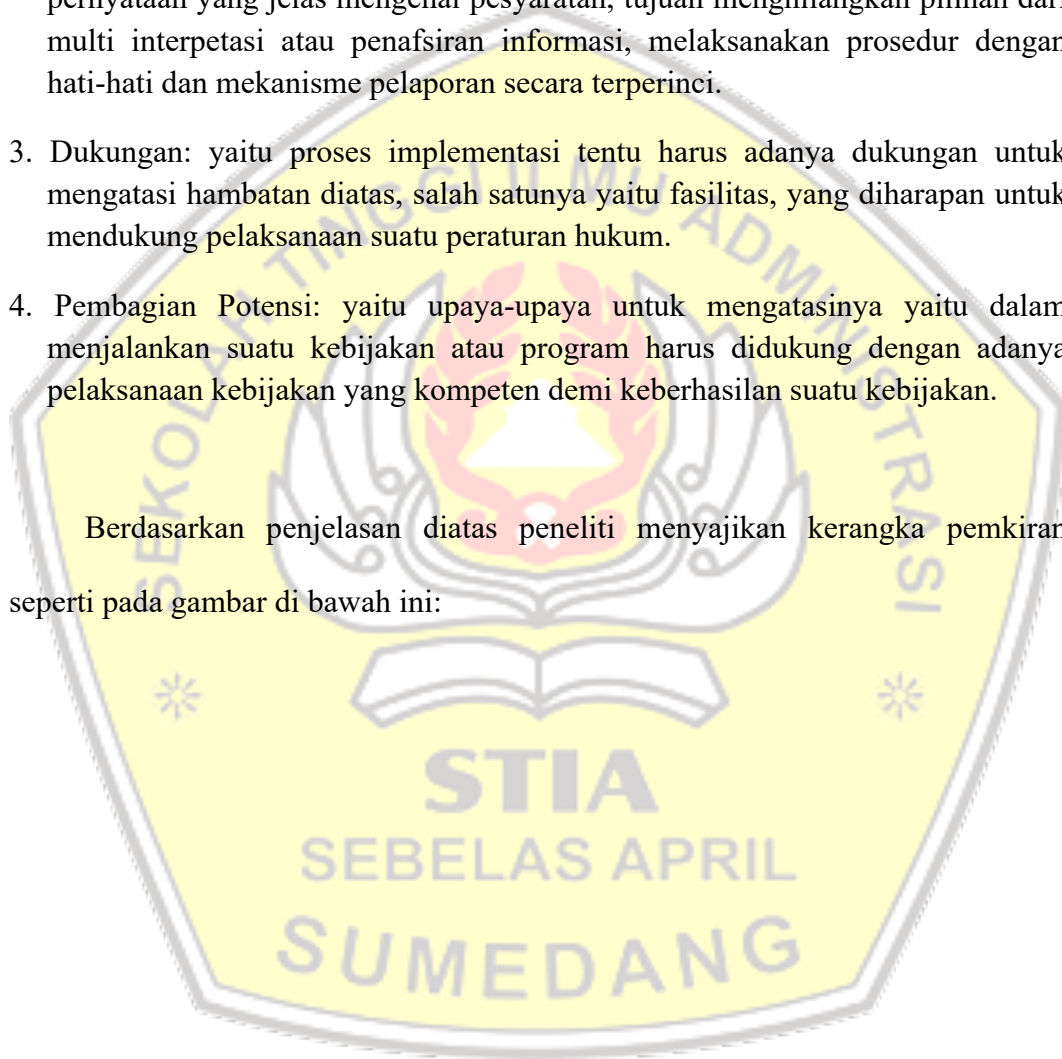
Sunggono (1994: 149-154) mengatakan hambatan-hambatan efektivitas program, sebagai berikut:

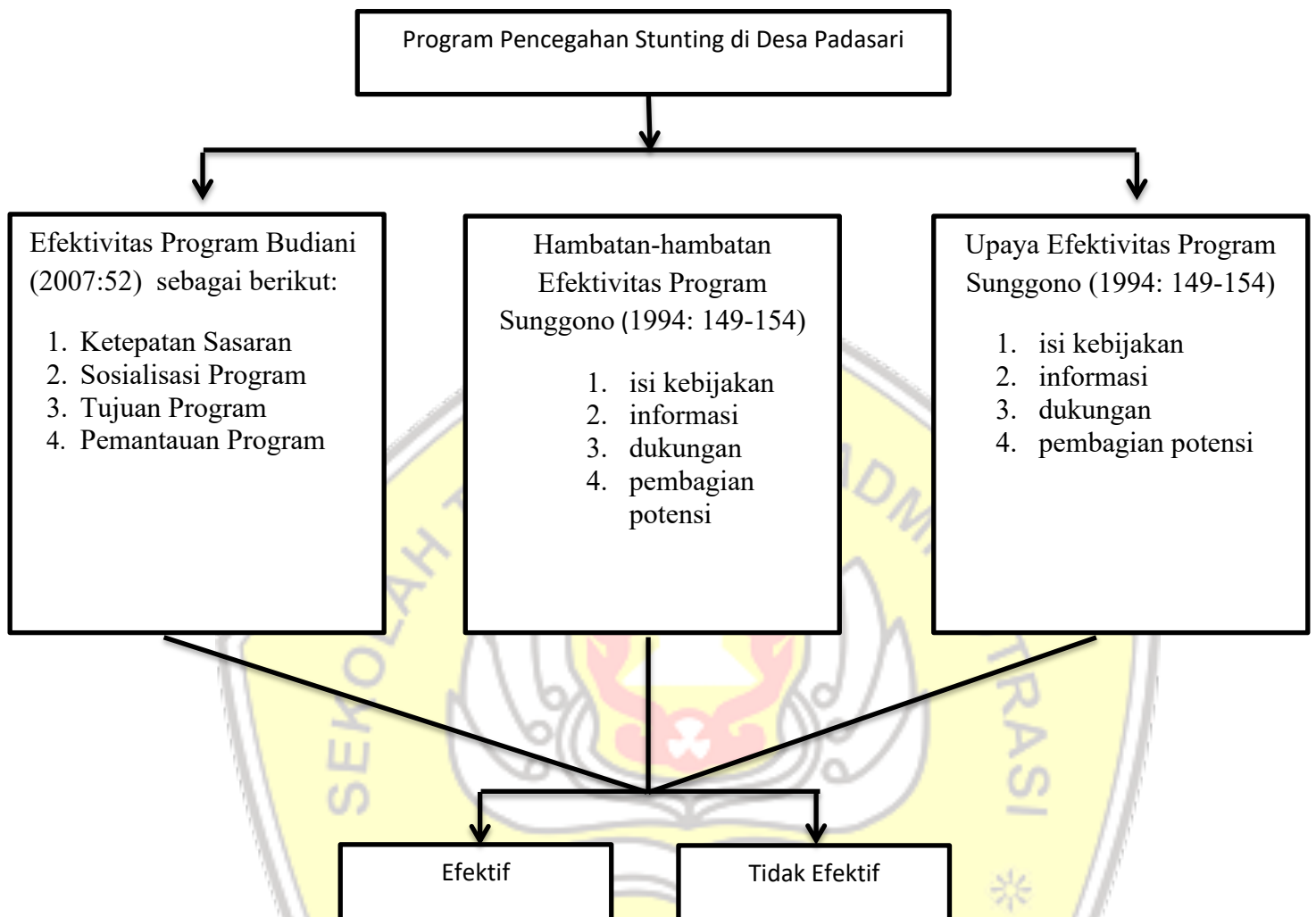
1. isi kebijakan: yaitu implementasi kebijakan publik dapat gagal karena masih samarnya isi kebijakan, kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang di laksanakan, dll.
2. Informasi: yaitu implementasi kebijakan publik mengansumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik.
3. Dukungan: yaitu pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
4. Pembagian potensi: yaitu Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku (aktor) yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Dan Sunggono (1994: 149-154) mengemukakan Upaya Efektivitas program, sebagai berikut:

1. Isi Kebijakan: yaitu upaya dalam mengatasi hambatan tentang isi kebijakan bahwa isi kebijakan perlu adanya beberapa faktor pendukung untuk melihat keberhasilan suatu program yang diimplementasikan yaitu, kepentingan dari isi kebijakan program tersebut karena suatu kebijakan dalam pelaksanaannya melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh kepada pengimplementasiannya.
2. Informasi: dalam mengatasi hambatan komunikasi cara untuk mengatasinya yaitu dengan melakukan tindakan dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai persyaratan, tujuan menghilangkan pilihan dari multi interpretasi atau penafsiran informasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terperinci.
3. Dukungan: yaitu proses implementasi tentu harus adanya dukungan untuk mengatasi hambatan diatas, salah satunya yaitu fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum.
4. Pembagian Potensi: yaitu upaya-upaya untuk mengatasinya yaitu dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyajikan kerangka pemikiran seperti pada gambar di bawah ini:





Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, peneliti membuat kisi-kisi pertanyaan, pedoman observasi untuk digunakan sebagai bahan pengamatan peneliti secara langsung pada objek penelitian mengenai variabel penelitian yaitu efektivitas program yang disajikan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

Tabel 2.2
Kisi-kisi Pertanyaan Penelitian

Fokus permasalahan	Dimensi	Indikator	No item
Efektivitas program Budiani (2007:53)	1. Ketepatan Sasaran	a. Monitoring dan Evaluasi terhadap sasaran	1
		b. Kegiatan Pendataan yang dilakukan dalam menentukan sasaran	2
		c. Tersedianya sarana dan prasarana	3
	2. Sosialisasi Program	a. Pengarahan dan evaluasi	4
		b. monitoring Pelaksanaan program	5
	3. Tujuan program	a. Kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku	6
		b. Komunikasi	7
	4. Pemantauan Program	a. Tanggung jawab pelaksana program	8
b. Pemeriksaan		9	
Faktor-faktor penghambat keberhasilan efektivitas program, Sunggono (1994:149-154)	1. Isi kebijakan	a. Pemahaaman isi kebijakan	10
		b. Manfaat kebijakan	11
		c. Sumber daya	12
	2. Informasi	a. Ketidakjelasan informasi	13
		b. Sasaran sosialisasi	14
	3. Dukungan	a. Penyelenggara Program	15

Fokus permasalahan	Dimensi	Indikator	No item
		b. Sasaran Program	16
	4. Pembagian Potensi	a. Pembagian tugas yang jelas	17
		b. Tanggung jawab	18
Upaya-upaya mengaasi hambatan efektivitas program, Sunggono (1994:149-154)	1. isi kebijakan	a. Pemahaman isi kebijakan	19
		b. Manfaat kebijakan	20
		c. sumber daya	21
	2. Informasi	a. Ketidajelasan informasi	22
		c. Sasaran sosialisasi	23
	3. Dukungan	a. Penyelenggaraan program	24
		c. Sasaranprogram	25
	4. Pembagian Potensi	a. Pembagian tugas yang jelas	26
	c. Tanggung jawab	27	



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Menurut Borg dan Gall yang dikutip oleh Sugiyono (2017: 8)

“Metode penelitian kualitatif atau sering disebut metode naturalistik, karena pada penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif”.

sugiyono (2017: 9) metode kualitatif adalah :

“ Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.

Pengertian kualitatif menurut Anggita dan Setiawan (2018: 8)

“mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowbaal*, teknik dengan pengumpulan dengan trigulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi”.

Pengertian kualitatif menurut Moleong (2012: 8-13) memiliki sejumlah

karakteris tertentu, yaitu.

1. Faktor alamiah
2. Manusia sebagai alat instrumen
3. Metode kualitatif
4. Analisis data secara induktif
5. Teori dari dasar
6. Deskriptif lebih mementingkan proses daripada hasil

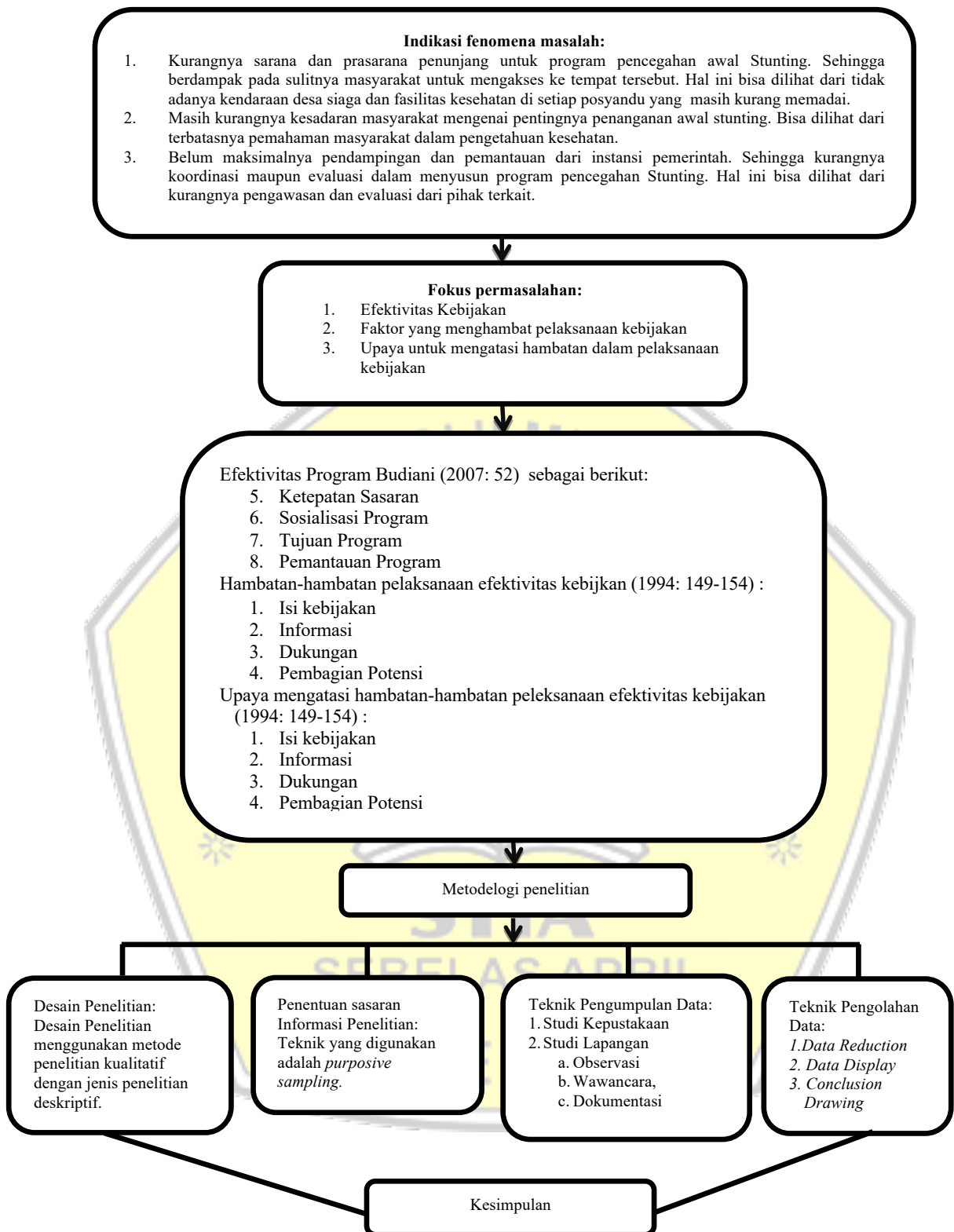
7. Lebih mementingkan proses daripada hasil
8. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus
9. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data
10. Desain yang bersifat sementara
11. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.

Dalam penelitian ini yang diamati adalah efektivitas program Pencegahan Stunting dalam mengurangi angka kemiskinan Desa padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini diharapkan data yang di dapat lebih lengkap serta bermakna dan pasti, hal ini sesuai dengan pendapat yang di kemukakan oleh Sugiyono (2017: 9), yaitu bahwa metode kualitatif di gunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang nampak.

Dengan demikian, penggunaan metode kualitatif dalam suatu penelitian dapat di peroleh data yang lebih tuntas, sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat digambarkan desain penelitian di bawah ini sebagai berikut:



Gambar 3.1
Desain Penelitian

B. Penentuan Sasaran dan Informan Penelitian

1. Penentuan Sasaran

Dalam melaksanakan penelitian, setiap kegiatan pengumpulan data selalu berhadapan dengan objek yang akan di teliti, baik berupa manusia, benda maupun aktivitas-aktivitas atau kejadian-kejadian di mana suatu masalah dapat menjadi sebuah objek penelitian.

Suatu kelompok masyarakat tidak dapat dilepaskan dari aktivitas orang-orang dengan pemahaman dan karakteristik yang berbeda-beda. Mereka dapat bersosialisasi dengan adanya komunikasi yang baik antara satu sama lain.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, menurut sugiyono (2017: 20) dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tempat, aktor/ pelaku/ orang-orang, dan aktivitas.

Dengan demikian, sasaran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sasaran Penelitian

No	Unsur	Jumlah (Orang)
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris	1
3	Kaur Perencanaan	1
4	Kaur Umum	1
5	Kaur Keuangan	2
6	Kasi Pemerintahan	1
7	Kasi Pelayanan	1
8	Kasi Kesejahteraan	1
9	Kadus	2
10	Bidan Desa	1
11	Kader Posyandu	20
12	Masyarakat	2
	Jumlah	34

2. Informan Penelitian

Dalam rangka memperoleh informasi dari informan, yang mana informan tersebut adalah aparatur Desa dan pihak yang terkait masalah stunting yang benar-benar memahami permasalahan dengan *argument* bahwa mereka mengetahui banyak mengenai masalah yang terjadi dilapangan, sedangkan sampel adalah wakil dari populasi yang akan diteliti.

Sedangkan teknik yang di gunakan dalam mengambil sampel adalah dengan menggunakan *Sampling Purposive*, menurut Sugiyono (2017: 85) adalah: “*Samplling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”.

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Informan Penelitian

No	Unsur	Jumlah (Orang)
1	Kepala Desa	1
2	Kaur Perencanaan	1
3	Bidan Desa	1
4	Kader Posyandu	1
5	Masyarakat	2
Jumlah		6

Peneliti mengambil sejumlah 6 orang tersebut diatas berdasarkan pertimbangan bahwa yang bersangkutan berkompeten dan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan Program pencegahan Stunting baik secara keseluruhan maupun sebagian tergantung tupoksi dan tingkat wewenang serta tanggung jawabnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Oleh karena itu data yang diperoleh dilakukan melalui:

1. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi.
2. Studi lapangan, dengan cara sebagai berikut:
 - a. Observasi, yaitu pengambilan data atau informasi dengan mengamati langsung terhadap objek yang sedang diteliti untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Teknik observasi yang dilakukan adalah observasi langsung yaitu peneliti mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung ditempat yang menjadi objek penelitian.
 - b. Wawancara, yaitu proses atau upaya yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan melalui tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan dan berkompeten, dalam hal ini yakni para pelaksana yang terlibat dalam program pencegahan stunting di Desa Padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang sebagai informan untuk memperoleh informasi yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan mendalam, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya telah disiapkan serta didukung dengan alat bantu seperti *handphone* yang memiliki aplikasi perekam suara. Yaitu pengumpulan data

dengan meminta penjelasan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data berupa rekaman hasil wawancara, foto-foto, catatan harian lapangan yang merupakan pelengkap hasil wawancara hasil observasi.

D. Prosedur Pengolahan Data

Untuk mengolah data hasil wawancara dan hasil observasi, peneliti melakukan pengolahan data yang ditempuh dengan mengacu pada operasi dasar yang menghasilkan keluaran penting yang mengutip dari model Miles and Huberman (1984) yang diterjemahkan oleh Sugiyono sebagai berikut :

Untuk mengelola data hasil wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengolahan data yang ditempuh dengan mengacu pada operasi dasar yang menghasilkan keluaran penting yang mengutip dari model Miles and Huberman (1984) yang diterjemahkan oleh Sugiyono sebagai berikut :

1. *Data reduction* (reduksi data)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
2. *Data display* (penyajian data)
Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah di pahami.
3. *Conclusion drawing verification* (pemeriksaan kesimpulan atau verifikasi)
Kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan adalah merupakan rumusan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi

atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

4. Triangulasi (gabungan)

Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data serta sumber data yang telah ada.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengolahan data adalah sebagai berikut.

1. Hasil penelitian melalui studi kepustakaan dituangkan dalam bentuk kutipan yang dilengkapi dengan sumber yang dikutip.
2. Data hasil penelitian dengan wawancara dituangkan dalam bentuk rangkuman hasil Tanya - jawab yang dituangkan secara verbal (kalimat).

E. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Dalam peneliian kualitatif tidak dikenal istilah populasi dan sampel. Istilah yang digunakan adalah datasetting atau tempat penelitian. Tempat penelitian nya adalah Desa Padasari Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. Untuk lebih jelasnya mengenai jadwal penelitian, dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah di uraikan pada Bab IV (Empat) mengenai Efektivitas Program Pencegahan Stunting di Desa Padasari Kecamatan Cimalaka kabupaten Sumedang. Selanjutnya Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Masih adanya hambatan dalam orang tua sasaran, karena masih mengabaikan saran dari pelaksana program tentang kebersihan lingkungan untuk pencegahan stunting.
- b. Ketidak jelasan Informasi dalam Pencegahan Stunting masih adanya hambatan, yaitu dari sasaran yang sering sekali mengabaikan informasi yang di sampaikan, dan dalam pencatatan informasi pendataan masih kurang jelas di karenakan pada saat penimbangan maupun pemeriksaan sering adanya balita (sasaran) yang mengamuk tidak ingin di periksa.
- c. Sasaran Sosialisasi pada Pencegahan Stunting masih adanya hambatan, karena dalam menyampaikan sosialisasi terbatasnya sumber daya manusia, kurang efektifnya orang tua sasaran dalam menanggapi, ini sangat berpengaruh pada program pencegahan stunting.
- d. Dalam Penyelenggara Program masih adanya kendala atau hambatan dalam pelaksanaan program seperti pemahaman masyarakat yang berbeda dalam menanggapi masalah stunting, anggaran yang tidak sepenuhnya tertutupi

untuk pemberian makanan tambahan kepada sasaran, dan sarana dan prasarana yang masih kurang memadai dalam seperti kendaraan desa siaga untuk keperluan masyarakat khususnya untuk sasaran.

- e. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang seperti kendaraan Desa Siaga.
- f. Anggaran yang urang memadai terhadap pemberian makanan tambahan kepada sasaran.

B. Saran

Pada akhir penulisan peneliti menuliskan beberapa saran sehubungan dengan penelitian yang telah di laksanakan, yang sekiranya di anggap perlu untuk di pertimbangkan sebagai bahan masukan kepada pihak yang berkepentingan dalam mengimplementasikan program, yaitu sebagai berikut:

1. Seharusnya orang tua sasaran harus lebih respect terhadap program pencegahan stunting ini, harus lebih memperhatikan kesehatan anaknya, pola makan yang seimbang setiap harinya, menjaga kebersihan lingkungan
2. Seharusnya sarana dan prasarana yang memadai seperti kendaraan Desa siaga di ajukan, sehingga masyarakat dan sasaran dapat memakainya sesuai dengan kebutuhan.
3. Dalam pemberian informasi harus jelas dan terarah sehingga sasaran dapat menerima informasi dengan mudah dan baik, dan informasi dalam pendataan pun harus benar-benar di perhatikan karena itu sangat

berpengaruh pada hasil perkembangan anak dan balita dalam menurunkan angka stunting.

4. Seharusnya pada saat penyampaian sosialisasi yang di sampaikan oleh pelaksana program orang tua sasaran harus dapat memperhatikan sosialisasi yang di sampaikan, karena setiap point yang di sampaikan sangat penting untuk perkembangan dan kesehatn anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Agus, Erwan P. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*: Yogyakarta. Gava Media
- Akadun. 2009. *Teknologi Informasi Administrasi*: Bandung. Alfabeta
- Ali, Faried dan Syamsu, Andi Alam. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*: Bandung. PT Refika Aditama
- Angrayni, Lysa dan Yusliati . *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*: Sidoharjo. Uwais Inspirasi Indonesia
- Cahyadiana, J., & Sulastri, L. (2019). ANALISIS PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS SEKTOR PERTANIAN DI KECAMATAN CIBINGBIN KABUPATEN KUNINGAN. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 4(1), 27-34. Retrieved from <https://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/36>
- Duun, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi kedua*: Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Gaol. L, Jimmy. 2015. *Keandalan dan Sukses Sekretaris Perusahaan dan Organisasi* : Jakarta. Pt Gramedia
- Hayat. 2018. *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro* : Jakarta. Prenadamedia Group
- Hidayat, Misbah . 2007. *Reformasi Administrasi, kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden* : Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama

Islamy, Irfan M. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan kebijakan Negara*: jakarta.

Bumi Aksara

Juhami. 2015. *Pengantar Administrasi Negara* : Makasar. CV Sah Media

Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan kelembagaan Pengawasan* : Bandung. PT

Refika Aditama



- Nonci, Nurjannah. 2017. *Implementasi Program Gernas kakao, studi Kebijakan program Gernas kakao Dikabupaten Luwu*: Makasar
- Nugroho, D Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*: Jakarta. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Nugroho, D Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*: Jakarta. PT Elex Media Komputindo
- Rahman, Mariati. 2017. *Ilmu Administrasi*: Makasar. CV SAH MEDIA
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*: Bandung. Alfabeta
- Silalahi, Ulbert. 2007. *Studi tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*: Bandung. Sinar Baru Algensindo
- Simamora, Roymond. 2009. *Buku Ajar Pendidikan dalam Keperawatan*: Jakarta
- Sunggono, Bambang .1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*: Jakarta. Sinar Grafika
- Susiani, Dina. 2019. *Hukum Admnistrasi Negara: Jember, Jawa Timur*. Cv Pustaka Abadi
- Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*: Jakarta. Erlangga
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Public Transpormasi*: Yogyakarta. Pikiran George Edward. Lukman Offset YPAPI
- Thoha, Miftah. 2014. *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*: Jakarta. Kencana
- Widya, Kristian Wicaksono, 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*: Yogyakarta. Graha Ilmu

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*: Jakarta. Pt Buku Kita

Zahrotunnisa, Zia, 2019. Efektivitas Program Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Atlet di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumedang. (STIA) Sebelas April Sumedang: Sumedang.

Zubair Gobel Erwin dan Koton P.Yosep. 2017. *Pengelolaan Danau Limboto dalam Perspektif Kebijakan Publik*: Yogyakarta. Cv Budi Utama

B. DOKUMEN-DOKUMEN:

Buku Panduan Fasilitas Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa

C. DOKUMEN LAIN:

Budiani, Ni Wayan. 2009. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “EKA TARUNA BHAKTI” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Input Jurnal Ekonomi Sosial.



